



PARLEMENTARIA DPRD KOTA JOGJA

RAPBD TA 2022 Kota Yogyakarta Disahkan

## Banggar Rekomendasi Pengadaan Lahan Pengolahan Sampah Terpadu

DPRD Kota Yogyakarta bersama wali kota Yogyakarta sepakat untuk menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 menjadi Perda APBD TA 2022 Kota Yogyakarta. Kesepakatan bersama itu dilakukan pimpinan Dewan Kota bersama Penjabat Wali Kota Sumadi. Penandatanganan dilakukan pada Jumat (25/11) yang baru lalu.

**SEBELUM** kesepakatan itu ditandatangani, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Yogyakarta Nurcahyo Nugroho membacakan sejumlah catatan dan rekomendasi. Catatan itu antara lain soal Tema Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah "Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat".

Namun, dilihat dari porsi APBD, walaupun menekankan pada basis pariwisata, nyatanya anggaran untuk Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta hanya Rp 16, 9 miliar. "Atau hanya sebesar 0,8 persen dari total APBD 2023," sindir Nurcahyo di depan paripurna. Masih dengan tema yang tidak jauh berbeda dengan tema tahun 2022. Mengusung tema besar pariwisata berbasis budaya, inovasi wisata perlu terus dilakukan melalui kegiatan yang sinergis dengan masyarakat. Sinergitas antar OPD juga sangat diperlukan. Harus dapat diukur kinerjanya.



RESMI DAN SAH: Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiyatmoko menandatangani dokumen disaksikan dua wakil ketua dewan di depan paripurna.

"Perlunya keterbukaan pelaksanaan anggaran yang berkaitan langsung dengan masyarakat di wilayah," pintanya. Adapun pengawasan dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) agar selalu dilibatkan secara aktif dalam perencanaan anggaran. "Terlebih bila ada rasionalisasi anggaran," ingatnya.

Banggar juga memberikan catatan terhadap masalah sampah. Banggar minta agar disikapi serius. TPST Piyungan yang

berulang kali ditutup. Ini sangat berdampak adanya penumpukan sampah di berbagai tempat di Kota Yogyakarta. Terkait itu, Banggar merekomendasi agar Pemerintah Kota Yogyakarta memaksimalkan fungsi ruang terbuka hijau publik (RTHP) untuk tempat pengolahan sampah di beberapa zona wilayah dengan melibatkan masyarakat sekitar.

Selanjutnya, menggerakkan relawan dari unsur masyarakat di setiap RW untuk melakukan pemilahan dan memantau

sampah rumah tangga. Juga memperhatikan secara serius kesejahteraan tenaga penarik gerobak sampah dengan meningkatkan insentif yang diterima. Menggalang dana CSR agar secara aktif ikut mendanai penanganan masalah sampah.

"Jangka panjang, menganggarkan dan merencanakan membeli lokasi yang dapat difungsikan dalam pengolahan sampah secara terpadu," ungkapnya. Banggar juga menyoroti kegiatan Posyandu yang perlu mendapatkan perhatian. Sejalan ini tak

ada OPD yang gampang. Hanya dibebankan ke wilayah. Pelaksannanya kemudian hanya tergantung kapasitas wilayah. "Perlu kebijakan yang tegas dari Pemerintah Kota Yogyakarta menentukan OPD sebagai *leading sector* pelaksanaan Posyandu," papar juru bicara banggar.

Pemerintah Kota Yogyakarta wajib memberikan dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan Posyandu kelurahan. Antara lain pengadaan alat kesehatan dasar timbangan digital untuk ibu/ anak, Antropometri, Thermometer, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu. Kemudian kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas.

Pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana. Dalam rangka memberikan perlindungan, Pemerintah Kota Yogyakarta wajib mendaftarkan LPMK, RT/RW, RK, PSM dan pekerja rentan pada program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan APBD TA 2023 harus melakukan antisipasi dan meminimalisasi dampak resesi. Wujudnya dengan membuat kebijakan insentif atau stimulus seperti pernah diberikan di awal pandemi Covid-19.

Terkait antisipasi dampak resesi 2023, Banggar DPRD Kota Yogyakarta akan mengadakan koordinasi rutin Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Yogyakarta agar inflasi dapat dikendalikan. (kus/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005